

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Situ

Edisi : 02 April 2009
Halaman : 25

Elevasi Situ Diturunkan Pemerintah Provinsi Siapkan Rumah Susun

JAKARTA, KOMPAS- Tanggul Situ Gintung akan dibangun kembali dengan elevasi lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini merupakan opsi ketiga dari tiga opsi yang ditawarkan oleh Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane.

Demikian diungkapkan Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio, Rabu (1/4). Menurut Pitoyo, ada tiga opsi yang disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa lalu.

Opsi pertama adalah situ dibangun kembali seperti semula dengan elevasi yang sama, yaitu 15 meter. Opsi kedua, membongkar situ dan menjadikannya seperti sebelum tahun 1930 di mana tidak ada genangan. Opsi ketiga, membangun kembali situ dengan elevasi yang lebih rendah, dari 15 meter menjadi 6 meter.

Opsi ketiga dipilih agar tingkat bahaya lebih rendah. Mengenai kapan Situ Gintung dibangun kembali, menurut Pitoyo, saat ini sedang diukur. "Situ ini penting bagi cadangan air bagi masyarakat setempat, terutama saat musim hujan," katanya.

Rumah susun

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kemarin, mengatakan akan menyiapkan rumah susun untuk korban bencana Situ Gintung. Rumah susun itu terutama disiapkan bagi warga yang sebelumnya menempati daerah sempadan situ maupun sungai.

"Bagi warga yang terkena relokasi, kami akan menyiapkan rumah susun untuk mereka tempati," katanya.

Namun, Atut belum bisa memastikan di mana rumah susun itu akan dibangun. Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu hasil survei Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang kini sedang menginventarisasi lahan milik pemerintah.

Adapun untuk pembangunan rumah susun, Pemerintah Provinsi Banten akan meminta bantuan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat. "Pemerintah daerah yang mencarikan lahan, sedangkan untuk bangunan diharapkan ada bantuan dari pusat," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Banten Winarjono.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berjanji organisasi yang dipimpinnya itu akan membantu memasok pakaian seragam dan buku untuk pelajar SD, SMP, dan SMA yang menjadi korban Situ Gintung.

Din Syamsuddin mengatakan hal itu saat mengunjungi korban Situ Gintung di lokasi pengungsian di aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Din menanggapi permintaan pengungsi yang cemas akan nasib anak-anak mereka.

Menurut Din, pihaknya akan membantu para korban Situ Gintung. "Silakan tinggal di sini sampai pemerintah menetapkan bahwa Bapak dan Ibu harus dipindahkan dari lokasi penampungan ini," katanya.

Tolak relokasi

Sementara itu, keputusan pemerintah untuk merelokasi korban tragedi Situ Gintung ditolak oleh sebagian warga. Menurut warga, pemerintah tidak bisa begitu saja merelokasi dan memberikan santunan.

"Sekarang yang salah itu siapa? Kami, warga di Cirendeui ini, adalah penduduk resmi dan memiliki surat-surat tanah maupun rumah yang diakui negara. Kalau mau memberi santunan, tolong diberikan sesuai kerugian masing-masing warga," kata Iwan Wibawa, warga RW 02, Cirendeui, Banten.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Selasa lalu, menyatakan Pemerintah Provinsi Banten akan menyumbang Rp 5 juta per keluarga. Sementara pemerintah pusat akan menyantuni korban Situ Gintung Rp 5 juta sampai Rp 30 juta sesuai dengan tingkat kerusakan tempat tinggalnya.

Akan tetapi, jumlah santunan pemerintah itu dianggap tidak layak. Muhammad Sardi, warga Kampung Situ Gintung, mengatakan, paling sedikit jumlah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban jebolnya tanggul Situ Gintung adalah Rp 50 juta-Rp 80 juta.

"Kalau seperti saya yang memiliki lahan 120 meter persegi dan sudah ada bangunan rumah seluas 90 meter persegi, uang Rp 30 juta tidak mungkin cukup untuk membangun ulang semuanya," kata Sardi.

Apabila direlokasi pun, kelengkapan fasilitas harus diperhatikan. Pemilik usaha angkutan umum mikrolet ini meminta ketersediaan air, jalan, bangunan rumah yang memadai, dan sarana transportasi harus ada.

Kriminolog Adrianus Meliala kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat telah lalai dengan tidak merawat Situ Gintung yang berakhir bencana. Untuk itu mereka harus bertanggung jawab penuh atas segala akibat, termasuk pemenuhan tuntutan warga terkait relokasi dan pemberian santunan. (NTA/NEL/KSP)